



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 764/III/2013

IV/MARET 2013



**Pimpinan Lembaga Negara Bertekad
Rampungkan Tugas dengan Baik**

KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR MARET 2013

Kegiatan AKD DPR-RI pada akhir bulan Maret ini tetap terfokus pada berbagai kegiatan rapat-rapat Komisi, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, penetapan pejabat publik, dan diplomasi parlemen. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR akhir Maret 2013.

Kegiatan Bidang Legislasi

Komisi-Komisi, Pansus dan Bagleg, masih memacu pembahasan berbagai RUU yang akan diselesaikan dalam Masa Sidang III. Khusus RUU tentang Penyiaran, Komisi I mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan DIM Sandingan terhadap RUU Penyiaran, serta menyelesaikan perumusan terhadap draft RUU tentang Konvergensi Telematika (RUU Telekomunikasi), dan draft RUU Revisi UU No. 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebelum berakhirnya Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013, yaitu pada April 2013.

Kegiatan Bidang Anggaran

Rapat-rapat Kerja Komisi I dan pasangan kerja, membahas mengenai: [1] Evaluasi Program Kerja Tahun 2012; [2] Rancangan Program Kerja Tahun 2013; [3] Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012; [4] tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Realisasi Anggaran tahun 2011-2012. Rapat-rapat tersebut terdiri dari: [1] dengan Ketua Dewan Pers dan Dirut Perum LKBN Antara tanggal 19 Maret. Terhadap agenda rapat tersebut, Komisi I berkesimpulan: memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Pers dan Perum LKBN Antara tahun 2012, dan meminta untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, sehingga mampu menjalankan Tupoksi dengan makin baik. Komisi I mendukung Dewan Pers untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan perusahaan pers, menjaga independensi pers, memberikan perlindungan optimal kepada wartawan yang terkena kasus kekerasan, dengan tetap merujuk Peraturan

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Perundang-Undangan dan Kode Etik yang berlaku. Melaksanakan Program Kerja Dewan Pers 2013. Mengingat jurnalistik merupakan ranah dan tanggungjawab antara Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi I mendorong Dewan Pers untuk terus melakukan koordinasi dengan KPI Pusat, sehingga berbagai permasalahan di bidang jurnalistik penyiaran dapat ditangani kedua pihak dengan lebih baik. Komisi I mendukung Program Kerja LKBN antara tahun 2013, sehingga mampu mewujudkan visi sebagai pusat informasi kebijakan negara, dan mampu berperan optimal sebagai *public relation* negara.

[2] Raker Komisi I dengan Menlu RI tanggal 11 Maret, berkesimpulan: Komisi I memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemlu tahun 2012 dan realisasi anggaran Kemlu tahun 2012 sebesar 81,30%, serta mendorong peningkatan kinerja Kemlu tahun 2013. Komisi I meminta kepada Pemerintah untuk berperan aktif memfasilitasi pemasaran produk-produk nasional di pasar internasional, serta meningkatkan upaya perlindungan dan pembelaan terhadap produk-produk nasional, bilamana terjadi pengekangan, sehingga produk-produk nasional dapat lebih kompetitif dalam pasar internasional, dalam rangka mendukung pelaksanaan Polugri yang berorientasi pada masalah ekonomi. Komisi I meminta Kemlu untuk meningkatkan fungsi komunikasi publik, khususnya terhadap bentuk-bentuk dis-informasi tentang Indonesia di berbagai media.

[3] Raker dengan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRRI) tanggal 14 Februari 2013. Kesimpulannya, Komisi I memberikan apresiasi terhadap kinerja



ja tahun 2012. Terkait dengan realisasi penyerapan anggaran LPP RRI tahun 2012 sebesar 87%, Komisi I meminta LPP RRI untuk melakukan perencanaan dan tata-kelola keuangan lebih baik, sehingga LPP RRI mampu meningkatkan penyerapan anggaran di tahun-tahun yang akan datang. Komisi I mendukung langkah LPP RRI untuk melaksanakan program kerja tahun 2013 dengan didahului *key performance indicator* (KPI) dan target yang jelas, sehingga visi “LPP RRI Sebagai Radio Berjaringan Terluas, Pembangun Karakter Bangsa, Berkelas Dunia” dapat segera terwujud. Komisi I mendukung langkah LPP RRI mencangangkan 2013 sebagai “Radio Saluran Pemilu 2014” dengan tetap menjunjung prinsip independen, netral, adil dan berimbang. Sehubungan dengan hal itu, Komisi I mendukung LPP RRI untuk memperluas jangkauan siaran di seluruh Indonesia, termasuk wilayah perbatasan dan pulau terdepan, bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Komisi I mendesak LPP RRI untuk meningkatkan kerjasama, guna melakukan penyelenggaraan penyiaran bersama, sehingga pelaksanaan program kerja isi siaran dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang efisien dan efektif.

Kegiatan Bidang Pengawasan

Raker Komisi II DPR dengan Mendagri, Dirjen Otda Kemendagri, dan Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, mengagendakan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) pada 20 Maret 2013. Dalam kesempatan ini Mendagri menyampaikan beberapa hal, diantaranya; [1] landasan penyusunan Desartada, [2] urgensi perumusan Desartada, [3] tujuan Desartada, [4] elemen pokok kebijakan Desartada 2010-2015, dan [5] strategi implementasi dalam pelaksanaan Desartada.

Dalam keterangan Mendagri mengenai elemen pokok kebijakan Desartada 2010-2015, dijelaskan mengenai: penerapan prosedur baru pembentukan daerah otonom melalui daerah persiapan; penggabungan dan penyesuaian daerah otonom; pengaturan daerah otonom yang memiliki kawasan dengan karakteristik khusus; estimasi jumlah daerah otonom di Indonesia hingga 2025. Urgensi perumusan Desartada: [1] desentralisasi tahun 1999 yang menyulut ledakan pemekaran daerah, [2] motivasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB): ketertinggalan dan akses jangkauan pelayanan publik; [3] lemahnya instrumen regulasi pembentukan DOB; [4] problematika pendekatan *bottom up* dalam pembentukan DOB; dan [5] ketiadaan persiapan sebagai daerah otonom. Sedangkan tujuan umum Desartada adalah akselerasi pengembangan politik nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

Kesimpulan Rapat: [1] Komisi II dapat menerima penjelasan yang disampaikan Mendagri berkenaan dengan Desartada yang merupakan sebuah konsep yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam gagasan pemikiran pemerintah dalam rangka penataan sebuah daerah. [2] Berkenaan dengan konsep Desartada yang membutuhkan langkah lanjutan, perlu dipertegas, apakah substansi materinya dirumuskan dalam UU di Pemerintahan Daerah, apakah juga akan masuk dalam UU yang secara spesifik dicantumkan dalam UU Pembentukan DOB atau dalam bentuk Peraturan Perundang-

Undangan yang secara spesifik membutuhkan penataan daerah ini. [3] Berkenaan dengan pembentukan DOB, DPR dan Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk memiliki hak-hak inisiatif mengusulkan DOB, namun dalam pembahasannya tetap mengacu dan berpedoman pada tata-cara peraturan perundang-undangan yang ada, dimana Pemerintah memiliki gagasan tentang Desartada dan itu ditempatkan menjadi bagian dari proses pembicaraan, pembahasan, sampai dengan terbentuknya DOB.

Pertemuan Silaturahmi ketua-ketua Lembaga Negara

Pertemuan Silaturahmi ketua-ketua Lembaga Negara pada Jumat 22 maret 2013, diagendakan: [1] perpisahan dengan Ketua MK Prof. DR. Mahfud MD, yang akan mengakhiri masa tugasnya pada akhir Maret 2013. [2] bincang-bincang politik tahun 2013, menghadapi Pemilu 2014. Dalam tema kedua ini, semua sepakat bahwa ada peningkatan kualitas stabilitas nasional di tahun politik 2013. Memang dirasakan bahwa suhu politik tahun 2013 makin menghangat, seiring dengan makin dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2014, oleh karena itu, semua sepakat untuk menjaga dinamika politik tetap dalam koridor demokrasi dan mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi. Jangan sampai proses politik yang berjalan merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang jauh lebih mendasar adalah menjaga proses politik dan demokrasi kita dalam bingkai koridor konstitusi. Demokrasi memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan dalam bingkai konstitusi. Secara kelembagaan DPR dan Pemerintah/Eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya masing-masing, terkait dengan fungsi kelembagaan legislatif, terutama mempercepat penyelesaian RUU-RUU strategis yang menjadi prioritas.

Penetapan Pejabat Publik

Tanggal 25 Maret 2013, Komisi XI mengagendakan *fit and proper test* terhadap Agus Martowardojo (Menkeu) sebagai Calon Gubernur BI, yang telah disampaikan pencalonannya oleh Presiden RI. Keputusan hasil dari uji kelayakan ini diambil oleh Komisi XI pada 26 Maret. Hasil dari Rapat tersebut adalah, Agus Martowardojo terpilih sebagai Calon Gubernur BI dengan perolehan suara 46 dari 54 anggota Komisi XI. Agus akan menggantikan Darmin Nasution yang akan berakhir masa tugasnya pada 23 Mei 2013. Persetujuan Komisi XI ini akan disampaikan di dalam Sidang Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Keputusan DPR-RI, dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR.

Diplomasi Parlemen

DPR-RI telah menghadiri *The PUIC Expert Committee on The Islamic Parliamentary Declaration* di Kharthoum Republik Sudan pada 5-6 April 2013. Sidang ini membahas mengenai *Draft Islamic Parliamentary Declaration* yang diusulkan oleh Parlemen Uni Emirat Arab (UEA) pada waktu sebelum Konferensi ke-7 PUIC di Palembang. Hasil dari acara *The PUIC Expert Committee on The Islamic Parliamentary Declaration* ini adalah: [1] menekankan pentingnya mendirikan *Islamic Par-*

liament yang diharapkan dapat menjadi langkah penting guna meningkatkan kerjasama parlemen diantara negara-negara PUIC. Komisi ahli (*Committee of Expert*) sebaiknya menyampaikan laporan ini kepada anggota *Executive Committee PUIC*, termasuk masukan-masukan dari Parlemen Anggota PUIC. [2] *Executive Committee PUIC* dapat mempertimbangkan Laporan Komisi Ahli tersebut dan mengajukannya di Konferensi PUIC berikutnya. [3] jika Konferensi PUIC menyetujui pembentukan *Islamic Parliament*, maka hal tersebut dapat diajukan ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT-OKI) untuk diputuskan. [4] jika disetujui oleh KTT-OKI untuk membentuk *Islamic Parliament*, perlu diusulkan untuk membentuk sebuah Komisi

Bersama (*Joint Committee*) PUIC-OKI untuk mempelajari seluruh hal yang bersifat teknis dan pengaturan-pengaturan lain dalam mendirikan *Islamic Parliament* ini, serta membuat juga sebuah perjanjian (*charter*) atau protokol yang akan diratifikasi oleh negara anggota OKI. [5] Di KTT-OKI, dalam pengambilan keputusan untuk persetujuan, hendaknya mempertimbangkan seluruh usulan dan pandangan yang diberikan oleh negara-negara anggota PUIC dan juga studi yang diselenggarakan oleh Sekjen PUIC mengenai pembentukan *Islamic Parliament*. [6] bertindak untuk mendukung PUIC, dan menekankan akan perlunya kesinambungan serta memperkuatnya, dan juga meningkatkan peranan PUIC tersebut.**

Pimpinan Lembaga Negara Bertekad Rampungkan Tugas dengan Baik



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono dan para Pimpinan Lembaga Negara saat memberikan keterangan pers usai pertemuan konsolidasi di Istana Negara.

Para pimpinan lembaga negara yang ada sekarang merupakan produk pemilu 2009. Sebagian besar akan mengakhiri tugasnya pada 2013 dan 2014 ini. Untuk itu, para pimpinan lembaga negara sepakat berkomitmen merampungkan tugasnya dengan baik sebelum pemilu 2014. Inilah yang mengemuka dalam pertemuan konsolidasi para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jumat (22/3).

Selain Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediyono sebagai tuan rumah, hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan beberapa menteri lainnya. Pertemuan juga membahas secara khusus masa tugas Ketua MK Mahfud MD yang berakhir awal April ini. Apresiasi disampaikan oleh Presiden kepada Mahfud

MD yang telah bertugas sangat baik.

Usai pertemuan, Presiden menyampaikan keterangan pers bahwa ada dua agenda utama pertemuan, yaitu pelepasan Mahfud MD sebagai Ketua MK dan mengokohkan tekad bersama merampungkan tugas konstitusional pimpinan lembaga negara. Mereka juga sepakat mengawal pemilu 2014 menjadi lebih baik.



Sementara Ketua DPR Marzuki Alie dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa poin penting terkait kinerja dan perkembangan di DPR. Saat ini, DPR sedang mempercepat beberapa RUU strategis yang menjadi prioritas. Dalam hal lain, Ketua DPR juga menyampaikan ada agenda pemanggilan Menteri BUMN Dahlan Iskan oleh Komisi VII dan IX yang setiap kali rapat kerja tidak pernah hadir.

Di bidang hukum, lanjut Ketua DPR, penegakan hukum harus ditingkatkan, sehingga kepastian hukum pun tercipta. Selain itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara profesional, proaktif, dan obyektif. Jangan sampai prosesnya dipolitisasi atau diintervensi untuk kepentingan politik tertentu. Sedangkan di bidang Hankam, profesionalisme TNI dan Polri perlu ditingkatkan. Potensi konflik antara TNI dan Polri tidak perlu terjadi lagi. (wy, mh)foto:wahyu/parle

Malik Haramain: Tidak Ada Pasal Represif dalam RUU Ormas



Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Abdul Malik Haramain saat menerima Forum Silaturahmi Ulama se-Jabodetabek dan Banten.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Abdul Malik Haramain menjamin tidak ada muatan represif dalam produk legislasi yang saat ini sedang dibahas DPR. Ia berharap publik dapat mempelajari RUU dengan seksama sehingga tidak terjebak informasi yang salah.

“Banyak yang mengatakan RUU Ormas ini represif, saya balik menanyakan pasal mana yang represif. Saya jamin tidak ada pasal yang mengancam bapak-bapak,” tegasnya saat menerima Forum Silaturahmi Ulama se-Jabodetabek dan Banten di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/13).

Ia memaparkan tidak seperti aturan sebelumnya yang lebih rumit, dalam RUU yang sedang dibahas ini aturan pendirian ormas jauh lebih mudah. 3 warga negara sudah dapat mengusulkan pendirian organisasi kemasyarakatan.

“Kita sampai di-komplain kok gampang sekali mendirikan ormas hanya 3 orang, prinsipnya kalau mau represif kita buat saja syaratnya minimal 100 atau 200 orang. Tapi kita tidak lakukan karena kita tidak ingin menghambat orang yang ingin berorganisasi,” tandasnya.

Ormas juga tidak harus berbadan hukum, para pendiri cukup meminta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemenag atau bisa juga mendaftar ke kecamatan untuk menyampaikan keterangan domisili kantor bersangkutan. Pembubaran ormas juga tidak bisa semena-mena dilakukan pemerintah, prosesnya harus dilakukan melalui persidangan di pengadilan.

“Tidak ada halangan bagi ormas untuk kritis, apalagi menjalankan *amar makruf nahi mungkar*, yang penting jangan kebebasan itu mengancam orang lain, merusak fasilitas umum, menyebar permusuhan dan melakukan kekerasan. Kalau melanggar ada peringatan sampai 3 kali, sanksi bantuan dihentikan. Langkah terakhir baru maju ke pengadilan,” lanjut politisi FPKB ini.

Sebelumnya juru bicara forum KH. Hamid Shuhrowardi menyampaikan pernyataan penolakan terhadap RUU Ormas karena dinilai menghambat kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban hak asasi diantaranya menegakkan *amar makruf nahi mungkar*.

“RUU Ormas hanya mengembalikan negeri ini ke era represif orde baru,” katanya tanpa menjelaskan pasal-pasal yang mendorong ke arah itu. (iky) foto: wy/parle

Pilkada Akan Dilaksanakan Serentak Dua Gelombang



Anggota Pansus RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Azhar Romli.

Anggota Pansus RUU Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Azhar Romli mengatakan, dalam perkembangan pembahasan RUU Pilkada telah disepakati penyatuan waktu pilkada secara serentak terdiri dua gelombang. Gelombang pertama adalah tahun 2015, sebanyak 279 pilkada propinsi maupun kabupaten.

Kemudian gelombang kedua yakni

pilkada tahun 2018, sebanyak 244 pilkada. “Jadi nanti masa transisi, misalnya sudah habis masa jabatannya tahun 2016 atau 2017, diberi tugas sebagai pejabat sementara (pjs) oleh pemerintah,” kata Azhar kepada Parlemen Rabu (27/3).

Dengan dua gelombang itu nanti ke depan dalam satu masa lima tahunan, maka paling banyak pemilu digelar dua kali, sekali pilkada (pemilu kepala daerah) dan sekali pemilu *legislative*. Bahkan ada pemikiran nanti pemilu *legislative* disatukan dengan pemilu Presiden, tapi masih belum *clear*. Disepakati pula nanti sengketa pilkada tidak digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi di Mahkamah Agung (MA). Bahkan penyelesaiannya nanti melalui pengadilan ad hoc bukan pengadilan umum, cukup dilakukan di Pengadilan Tinggi (PT) tidak semua dibawa ke MK.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam pembahasan RUU Pilkada juga sudah ada titik temu

mengenai masalah politik dinasti, waktu serentak, masalah dana dari APBD yang sumbernya antara lain dari APBN (DAU) diatur dan disisihkan. “Kita berharap UU Pilkada ini lebih dulu diselesaikan ketimbang UU Pemda,” ia menambahkan.

Azhar Romli juga mengungkapkan, ada semangat yang sama bahwa Otonomi Daerah ini kalau bisa konsentrasinya di Propinsi bukan di Kabupaten/kota karena kita ingin lebih menguatkan posisi Gubernur. Juga semangat untuk pemilu langsung apakah Gubernur atau Bupati/Walikota, yang penting Gubernur atau Bupati dipilih secara demokratis baik oleh DPRD atau pemilu langsung.

Pemikiran itu berdasarkan pertimbangan bahwa yang penting tidak melanggar UUD 45, selain itu untuk mengurangi dampak konflik sosial dalam pilkada yang akhir-akhir marak terjadi di beberapa daerah. (mp) foto: od/parle

Komisi X DPR Minta Pelaksanaan ISG Ditunda



Anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi Gumelar berdialog dengan Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI) Rita Subowo.

Penyelenggaraan *Islamic Solidarity Games* (ISG) 2013 di Riau diminta untuk ditunda, untuk itu Komisi X DPR mendesak Pemerintah agar mengoptimalkan waktu dan sumber daya manusia dalam mempersiapkan venues, infrastruktur guna mensukseskan pelaksanaan ISG tahun 2013.

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Asisten Menteri Pemuda dan Olahraga Yuli Mumpuni Widarso di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (27/3) siang.

Agus Hermanto menambahkan, dengan ditundanya pelaksanaan *Islamic Solidarity Games* tersebut, Komisi X DPR mendorong agar Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga dapat meraih sukses prestasi dan sukses pelaksanaan.

Disamping itu, Komisi X DPR juga mengapresiasi langkah dan program yang akan dilakukan KOI, KONI, dan Satlak Prima yang telah mempersiapkan ISG 2013 dan SEA Games dan Para Games untuk lebih mengoptimalkan dan memfokuskan programnya. Dengan demikian dapat meraih sukses prestasi, dengan lebih fokus kepada kesiapan atlet dan persiapan cabang olahraga yang potensial ditargetkan



untuk memperoleh medali emas.

Anggota Komisi X DPR yang lain Dedi Suwandi Gumelar yang akrab dipanggil Mi'ing mengatakan, KOI sebagai penyelenggara internasional ada kekhawatiran ketidaksiapan terutama terhadap sarana dan prasarana yang ada, karena sarana dan prasarana di Riau adalah bekas PON yang sampai saat ini masih ada masalah hukum.

Melihat kondisi seperti ini, maka DPR menyarankan agar pelaksanaan *Islamic Solidarity Games* diundur, semula dijadwalkan bulan Juli lalu, akan dilaksanakan paling cepat September atau Oktober 2013.

Dedi Suwandi Gumelar mengemukakan, setiap even



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

olahraga baik nasional maupun internasional selalu menghadapi proses anggaran, karena kegiatan olahraga kita selalu mengikuti siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan siklus APBN selalu tidak sama waktunya dengan penyelenggaraan even olahraga sehingga harus ada terobosan baru dari Pemerintah atau DPR.

“Seharusnya kita mempunyai dana abadi sehingga setiap saat ada kegiatan olahraga selalu tersedia dan siap untuk digunakan,” tegas Dedi menambahkan. (spy), foto : wy/parle/hr.

Anggota DPR Desak Semua Pihak Terkait, Satu Hati Majukan Persepakbolaan Nasional

Anggota Komisi X DPR Jefri Riwu Kore mengapresiasi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang berhasil menyatukan dua kubu, tetapi keberhasilan ini belum 100% karena masih ada kerikil-kerikil tajam yang mengganggu ke depan bagi keutuhan dan persatuan sepak bola di Indonesia.

Persoalan itu ada di Badan Tim Nasional (BTN) yang diketuai Irsan Noor, yang telah menentukan Blanco sebagai pelatih. Tetapi pada saat Irsan tidak ada, wakil ketua BTN mengganti pelatih dengan Rahmad Darmawan sehingga terkesan BTN tidak punya legitimasi sehingga orang lain bisa mengganti pelatih dengan mudah.

“Ini perlu solusi lagi oleh Kemenpora dan semua *stake holder* yang memiliki visi yang sama untuk memajukan sepak bola Indonesia,” jelasnya kepada Parlemtaria di Gedung DPR. Meski demikian, Jefri menilai kasus ini tidak sebesar sebelumnya dan dia percaya Menpora Roy Suryo akan mampu menyelesaikan masalah ini.

“Yang penting ada kemauan semua pihak untuk satu hati memajukan persepakbolaan nasional. Poinnya adalah masyarakat tidak melihat kelompok-kelompok mana, yang dilihat adalah prestasi sepak bola Indonesia,” tukasnya.



Anggota Komisi X DPR Jefri Riwu Kore.

Ditegaskan politisi Partai Demokrat ini, masyarakat tidak peduli siapa pelatihnya yang penting adalah hasilnya. Yang dilihat adalah kemenangan dan prestasi, karena itu antusiasisme masyarakat harus dijawab dengan sikap tegas PSSI menyelesaikan masalah internal yang dihadapi, sehingga tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari.

Karena itu pula, saran Jefri, Menpora Roy Suryo diminta segera menyatukan masalah-masalah yang muncul pasca KLB. Termasuk stuktur BTN yang menurut informasi yang

diperoleh belum ada, tetapi sudah ada yang mengangkat diri menjadi wakil sehingga secara mendadak mengganti pelatih yang ditetapkan BTN.

Saat ditanyakan apakah Menpora bisa bertindak lebih tegas menghadapi kondisi ini, Jefri mengaku salah satu keberhasilan Menpora Roy Suryo memfasilitasi KLB PSSI. “Sebagai wakil rakyat saya melihat Menpora ini tidak neko-neko, yang dilihat aturannya saja sehingga semua pada koridor yang benar,” ujarnya dengan menambahkan, Menpora akan bisa menyelesaikan masalah-masalah di PSSI.

Menanggapi salah satu hasil KLB PSSI yang akhirnya menyatukan dua kompetisi ISL dan IPL, Jefri mengakui secara jujur kualitas ISL lebih bagus sehingga dalam kompetisi tahun depan mayoritas dari ISL sementara dari IPL hanya 4 klub. Itu adalah hal yang wajar dan seharusnya kita berbesar hati, ini adalah jalan keluar yang baik.

“Masyarakat sudah capai, saya harapkan PSSI segera menyelesaikan masalah internalnya dan momen bersatunya kompetisi harus dijawab dengan terbentuknya tim PSSI yang solid dan kuat sehingga pada gilirannya akan menorehkan kemenangan dan prestasi yang dibanggakan,” ujar Jefri menambahkan. (mp), foto : od/parle/hr.

DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan dan Stabilitas Harga Produk Hortikultura



Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy dengan Menteri Pertanian Suswono.

Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah menjamin ketersediaan dan stabilitas harga produk hortikultura, serta menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan hortikultura, dengan memberikan informasi produksi dan konsumsi yang aktual kepada petani dan dunia usaha.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV deng-

an Menteri Pertanian Suswono, membahas importasi pangan dan produk hortikultura, di Gedung DPR, Jakarta (26/3). “Komisi IV meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah-langkah strategis dan koordinasi maksimal da-

lam rangka normalisasi dan stabilisasi harga seluruh produk hortikultura, termasuk produk hortikultura impor,” Ketua Komisi IV Romahurmuzy.

Selanjutnya, untuk meningkatkan produk hortikultura lokal maupun devisa negara, serta melindungi petani hortikultura lokal dan menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan. Dia menegaskan Komisi IV meminta kementerian Pertanian untuk meningkatkan pembinaan dan fasilitas berkelanjutan kepada petani hortikultura lokal.

Selain itu, Romahurmuzy menjelaskan Komisi IV meminta Pemerintah untuk mempercepat kajian penerapan pelayanan perijinan 1 atap importasi produk hortikultura. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta untuk segera mengevaluasi dan mensinkronisasi Permentan dan Permen dag.

Kemudian, Komisi IV meminta Pemerintah untuk melakukan kajian kemungkinan penggunaan tarif bea masuk pengamanan sebagai pengganti sistem kuota yang saat ini dijalankan untuk impor produk hortikultura. (as), foto : wy/parle/hr.

Setjen DPR Laksanakan Survey Internal PMPRB Online

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang tengah digalakkan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Setjen DPR RI melakukan survey internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

PMPRB Online merupakan instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web untuk memudahkan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dalam hal mengumpulkan data, pengolahan data, evaluasi data, monitoring serta memudahkan proses saling belajar secara *real time*.

Nantinya dari penilaian tersebut diharapkan dapat menjawab apa saja yang menjadi kelemahan dari penyelenggaraan

pemerintahan dalam hal ini Kesetjenan DPR RI.

Sosialisasi survey di Sekretariat Jenderal DPR RI telah dilakukan sejak 21 Februari lalu, dan pelaksanaannya dimulai pada Rabu (27/3) pagi.

Survey internal bertujuan untuk menentukan tunjangan kinerja baik Pejabat Setjen maupun Karyawan Setjen DPR RI. Survey dilakukan dengan cara pengisian kuisioner yang dilakukan baik oleh karyawan maupun pejabat yang tentunya berkaitan dengan kinerja Kesetjenan DPR RI.

“Saya berharap pengisian kuisioner tidak hanya berdasarkan atas suka dan tidak suka saja, melainkan juga ada bukti-

bukti yang bisa dijadikan landasan dalam pengisian kuesioner tersebut,” jelas K. Johnson Rajagukguk, Deputi Bidang Perundang-Undangan Setjen DPR RI.

Ditambahkan Johnson, ia berharap agar hasil akhir dari survey internal yang berpengaruh terhadap tunjangan dan penghasilan karyawan serta pejabat Kesetjen ini bisa segera terealisasi. Karena menurutnya hal tersebut sebagai bentuk penghormatan dari kinerja karyawan dan Pejabat Kesetjen DPR RI selama ini. (Ayu), foto : wy/parle/hr.



Deputi Bidang Perundang-Undangan Setjen DPR RI K. Johnson Rajagukguk.

Diprediksi Tahun 2013 Bencana Meningkat



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

Tahun 2013 diprediksi bencana alam akan semakin meningkat, baik jenis maupun jumlahnya. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif Selasa (26/4) di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta.

Prediksi tersebut menurut Syamsul Maarif didasarkan atas penelitian para ahli. Melihat perubahan iklim yang terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Perubahan iklim

tersebut membuat *magnitude* terhadap bencana semakin besar.

“Siklus bencana 25 tahunan dengan adanya perubahan iklim ini sudah tidak relevan lagi. Mentawai yang dua tahun lalu saja terkena musibah tsunami, tahun ini diprediksi akan kembali terkena bencana serupa. Hal itu semua karena perubahan iklim yang tidak menentu,” jelas Syamsul.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini yang memimpin rapat kerja tersebut mengatakan semoga prediksi itu salah dan tidak terbukti, sehingga wilayah Indonesia bebas dari bencana.

Meski demikian, ditambahkannya, BNPB perlu memberikan informasi yang jelas tentang prediksi bencana tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi.

“BNPB harus menginformasikan kepada masyarakat tentang prediksi tersebut atau paling tidak BNPB memiliki langkah strategi penanggulangan bencana sebelum bencana itu terjadi. Sehingga ketika prediksi itu terjadi masyarakat mengetahui langkah apa yang harus segera dilakukan,” tegas Jazuli.

Syamsul Maarif mengatakan bahwa BNPB selain telah menurunkan petugas khusus untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana, juga telah melakukan koordinasi dengan koramil di beberapa daerah yang rawan bencana.

Selain itu, penyebaran berita melalui media massa sangat efektif membantu menginformasikan prediksi bencana disertai dengan sosialisasi langkah-langkah yang harus dilakukan jika bencana itu terjadi. (Ayu) foto:ry/parle

Komisi X Pesimis Dapat Cairkan Anggaran Kurikulum 2013 Tepat Waktu



Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah.

Komisi X DPR merasa pesimis dapat mencairkan anggaran kurikulum 2013 tepat waktu, sekalipun anggaran untuk kurikulum baru itu diloloskan DPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan sempat mengembangkan proyek kurikulum.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Senin malam (25/3) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto.

Ferdi menambahkan, sekalipun anggaran kurikulum baru itu diloloskan

DPR, Kemendikbud tidak akan sempat untuk menjalankan kurikulum baru, karena ini diibaratkan seperti bunga yang layu sebelum berkembang.

Sekarang sudah akhir Maret, akan tetapi belum ada tanda-tanda Kemendikbud dapat meyakinkan DPR tentang urgensi kurikulum baru 2013. "Jika Komisi X DPR setuju, paling tidak keputusan baru diputuskan bulan April," tegas Ferdi.

Ferdiansyah menambahkan kembali, masalah kurikulum prosesnya masih panjang, masih harus diproses ke Kementerian Keuangan. "Ini berarti paling tidak anggaran baru cair akhir Mei, sedangkan kurikulum baru sudah harus terlaksana Juni, apakah sempat," Ferdi mempertanyakan hal ini.

Sementara Anggota Komisi X DPR yang lain, Akbar Zulfakar menyatakan mandeknya pencairan dana di sejumlah Kementerian dan lembaga akibat koordinasi yang lemah antar Kabinet.

Hasil dari rapat malam itu mengambil kesimpulan, Panja Kurikulum Komisi X DPR memberikan kesempatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan konsultasi dengan BPKP terkait dengan anggaran



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto.

kurikulum 2013 yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Panja Kurikulum secepatnya.

Kesimpulan berikutnya mengatakan, Panja Kurikulum Komisi X DPR akan membahas dan memutuskan kebijakan dan anggaran kurikulum 2013 dalam rapat intern Panja dan diteruskan dalam rapat intern Komisi untuk selanjutnya akan dibawa dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 10 April mendatang. (spy), foto; wy/parle/hr.

Main Hakim Sendiri Atas Nama Apapun Tidak Dibenarkan



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menegaskan, kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan Sleman, Yogyakarta yang menewaskan empat tahanan titipan Polda DIY tidak boleh terulang kembali. Tidak boleh atas nama apapun, melakukan eksekusi atau main hakim sendiri, itu tidak dibenarkan dalam tatanan Undang-undang atau peraturan di negara ini.

Karena itu memang sewajarnya semua kita prihatin dan ini hendaknya peristiwa yang terakhir kalinya. Namun demikian, dia menyerukan kepada semua pihak untuk tidak tergesa-gesa menuduh pelaku penyerbuan adalah TNI apalagi Kopassus. "Saya tidak meyakini itu, sebab pada saat itu mereka melepaskan baju dan atributnya. Apalagi suasana perpolitikan nasional kita saat ini dan kita bangga aparat TNI menjaga rasa aman di negara kita," ujarnya menjawab pers di Gedung DPR Selasa (26/3) siang.

Selanjutnya kata politisi Partai Golkar ini, hendaknya kita jangan tergesa-gesa menuding kepada pihak-pihak tertentu termasuk TNI seolah-olah itu didisain untuk mengatakan eksekusi tersendiri. “ Saya menyerukan itu, biarlah tim pemerintah yang akan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi,” tandasnya.

Dia meminta semua pihak untuk melihat ke depan, supaya hal semacam ini tidak terulang. Saat ditanya apakah perlu dibentuk tim independen untuk mengusut kasus ini, Priyo mengatakan tidak perlu independen segala, serahkan saja kepada pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian saja.

Sebagai tindak lanjut sikap DPR apakah akan mengundang Panglima TNI? “Otomatis nanti Komisi-Komisi terkait akan mengundang instansi sehubungan terjadinya kasus tersebut,” jawab Priyo.

Kunjungi Sleman

Secara terpisah rapat Pleno Komisi III DPR RI memutuskan untuk melakukan kunjungan lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Kunjungan ini diharapkan dapat menggali informasi dari tangan pertama seputar penyerangan lapas oleh kelompok bersenjata terlatih beberapa waktu lalu.

“Kita harus tahu lebih detail karena kasus ini terkait dua mitra kerja kita Kemenkumham dan Polri. Informasi yang kita peroleh di lapangan baik di Polda Yogya maupun di Lapas akan menentukan langkah-langkah yang akan kita sampaikan pada saat bertemu mitra,” kata Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika yang dihubungi disela-sela kunjungan kerja di Balikpapan, Kaltim (26/3/13).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan kunjung-



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika.

an ke Sleman, Jateng dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 4-5 April yang akan datang. “Saya akan pimpin langsung kunjungan ini. Bagi saya penyerangan ini kasus serius jadi perlu kita lihat konkrit di lapangan,” imbuhnya.

Anggota Komisi III, Martin Hutabarat menekankan Polri harus mampu mengungkap kasus penyerangan ini. Ia juga menyambut baik kesediaan institusi militer untuk diperiksa dan memberikan informasi yang mungkin diperlukan.

“Kita belum bisa menduga-duga siapa yang terlibat, yang pasti kita minta Polri harus mampu mengungkap kasus penyerangan ini. Kalau Polri tidak mampu maka kita harus mampukan, itu tugas dari Komisi III,” pungkask dia. (mp,iky), foto : doc/parle

Priyo Tetapkan Arif Wibowo Sebagai Wakil Ketua Komisi II



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso berfoto bersama Pimpinan Komisi II usai menetapkan Arif Wibowo sebagai Wakil Ketua Komisi II yang baru.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menetapkan Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR yang baru menggantikan Ganjar Pranowo yang saat ini tengah sibuk menjalani suksepsi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah.

“Saya mengumumkan Pak Ganjar Pranowo digantikan oleh Pak Arif Wibowo, oleh karena itu ijin saya minta persetujuan kepada seluruh anggota Komisi II DPR, apakah penggantian tersebut bisa langsung kita ketuk palu,” tanya Priyo saat memimpin rapat penetapan tersebut, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/3).

“Setuju.....” jawab seluruh anggota secara bersamaan, dan palu

pun diketuk, selanjutnya Priyo mempersilahkan pimpinan Komisi II DPR untuk maju ke depan meja pimpinan guna melakukan serah terima palu yang diwakili oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa.

Sebelumnya, Priyo menjelaskan, pergantian Ganjar Pranowo ini harus dimaklumi karena kesibukannya dalam pencalonan Pilkada Jateng, dan penggantinya Arif Wibowo menurut Priyo, merupakan pribadi yang tidak kalah hebat, kritis, dan tentunya kader-kader terbaik dari PDI Perjuangan

Penggantian Ganjar kepada Arif Wibowo sebelumnya diumumkan Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa di

sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung DPR, Senin (25/3) siang.

Dalam kesempatan ini, Arif Wibowo menyatakan kesiapannya untuk menjadi Pimpinan Komisi II DPR. “ Saya sudah belajar untuk menjadi Pimpinan rapat yang baik. Maka saya akan memanfaatkan waktu untuk menyampaikan pertanyaan kepada KPU,” kata Arif Wibowo dalam RDP kali ini.

Politisi PDI Perjuangan ini dikenal cukup vokal dan kritis khususnya dalam masalah politik dalam negeri termasuk masalah-masalah yang dihadapi KPU. Seperti rekan yang digantikannya Ganjar Pranowo, keduanya cukup de-

kat dengan wartawan terutama saat diminta komentarnya seputar perkembangan masalah perpolitikan tanah air.

Politisi PDI Perjuangan kelahiran 29 Juni 1968 di Madiun ini sebelum menjadi anggota Dewan sudah malang melintang di organisasi sekolah serta mahasiswa dan menjadi pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari tingkat Kabupaten hingga Sekretaris GMNI Korda Jatim. Di DPR selain sebagai anggota Badan Legislatif (Baleg) Arif Wibowo juga pernah menjabat Ketua Pansus RUU Pemilu. (nt,mp) foto :wy/parle

Komisi VI Dengarkan Keluhan Petani Garam Madura



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.

Petani garam Madura yang tergabung dalam Gerakan Gotong Royong Petani Garam Madura menyampaikan aspirasi dan persoalan yang hingga kini belum selesai ke Komisi VI DPR. Persoalan yang mengemuka adalah lahan garapan yang masih dikuasai PT. Garam. Sengketa lahan ini belum menemukan titik temu, sehingga para petani resah dan gamang menggarap lahan garamnya.

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Deputi BUMN, Dirjen Berbasis Manufaktur Kementerian Perindustrian, Direksi PT. Garam, dan para petani garam, Selasa (26/3).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan), itu ingin memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para petani garam untuk menyampaikan persoalan yang membelit mereka selama ini.

“Petani garam Madura sudah menyampaikan masalah lahan penggarapan. Sampai saat ini belum ada penyelesaian karena lahan tersebut masih dikuasai PT. Garam,” kata Aria Bima saat memimpin rapat. Persoalan lahan garapan ini memang agak pelik. Riwayat lahan garapan yang ada di Madura tersebut sebenarnya merupakan peninggalan Belanda yang diperoleh dengan pengambilalihan lahan tersebut dengan menyewa selama 50 tahun.

Dari dokumen yang ada, beraksara Jawa kuno pernah ditandatangani oleh Kepala Desa Pinggir Papas Sastro Widjono dan Kepala Desa Karang Anyar Sastro Soedeso dengan Bupati Sumenep Raden Tumenggung Ario Samadikun, terhitung tanggal 7 Agus-

tus 1936.

Batas waktu perjanjian adalah 7 Agustus 1986 yang seharusnya lahan tersebut dikembalikan kepada petani garam. Namun, lahan tidak dikembalikan tetapi terbit sertifikat hak pakai atas nama Departemen Perindustrian c.q. PT. Garam.

Para petani garam berupaya melakukan berbagai cara untuk mendapatkan haknya kembali sesuai perjanjian. Musyawarah mufakat pernah dilakukan yang difasilitasi Pemda Jatim. Namun, sampai saat ini belum ada realisasi yang menguntungkan untuk para petani garam.

“Petani hanya menggarap, tidak mengambil hak. Cuma, kok, belum ada eksekusi. Makalini kita memfasilitasi supaya ada kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain sesuai kesepakatan itu,” kata Aria.

Persoalan ini sebelumnya dipegang oleh Kementerian Perindustrian sebelum ditangani Kementerian BUMN. Peralihan dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian BUMN juga ternyata menyisakan masalah. “Aki-ibatnya, sampai sekarang macet pada implementasi kesepakatan-kesepakatan itu,” ungkap Aria Bima. (mh), foto : od/parle/hr.

Pro-Kontra Revisi RUU Advokat

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali mengundang dan meminta masukan sejumlah organisasi advokat yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan rencana DPR RI melakukan revisi terhadap Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat.

Revisi Undang-undang Advokat ini menurut Achmad Dimiyati Natakusumah, menjadi salah satu dari 70 target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Hal ini menurut Dimiyati menjadi salah satu jalan mengatasi konflik advokat. Melihat pentingnya hal tersebut Senin (25/3) Baleg mengundang delapan asosiasi advokat yang ada di Indonesia yaitu IKADIN, HAPI, AAI, AKHI, HKHPM, IPHI, SPI, dan KAI setelah sebelumnya meminta masukan dari beberapa ahli hukum.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) ini sempat terjadi pro dan kontra terhadap rencana DPR RI merevisi Undang-undang advokat ini. Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang diketuai oleh Indra Sahnun Lubis dan beberapa organisasi advokat lainnya mendukung rencana DPR melakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut.

“Kami mendukung DPR RI untuk merevisi Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat terutama pasal 28 yang menyatakan organisasi advokat terbentuk harus dengan munas atau kongres advokat, bukan munas organisasi advokat,” jelas Indra.

Ditambahkannya, selain itu pihaknya meminta DPR untuk memanggil MA berkaitan dengan surat edaran MA yang menyatakan bahwa setiap advokat melakukan sumpah di bawah organisasi PERADI (Persatuan Advokat Indonesia). Padahal dalam pasal 4 jelas menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan bersungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Salinan dari berita sumpah tersebut baru dikirimkan ke Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat.

“Di sini jelas-jelas Mahkamah Agung telah melanggar pasal 4 tersebut



Wakil Ketua Baleg DPR Dimiyati Natakusumah.

dengan memberikan surat edaran bahwa setiap advokat harus melakukan sumpah melalui PERADI. Hal ini yang akhirnya menimbulkan perkelahian di kalangan advokat. Untuk itu kami mendukung DPR untuk merevisi Undang-undang tersebut agar benar-benar jelas mengenai sumpah advokat ini. Dengan begitu Undang-undang tersebut sekaligus membatalkan surat edaran MA,” ungkapnya.

Sementara itu pihak yang menentang rencana revisi Undang-undang tersebut, yakni IKADIN dan AAI menyatakan bahwa draft revisi Undang-undang No. 18 tahun 2003 yang tengah digodok di Baleg DPR RI itu sangat merendahkan profesi advokat.

“Organisasi advokat awalnya di bawah Kehakiman sekarang Kementerian Hukum dan HAM. Dalam menjalankan profesi kami, kami tidak menggunakan uang negara. Padahal kami juga membayar pajak untuk negara. Janganlah kami direndahkan lagi dengan menyebut advokat sebagai mitra penegak hukum. Namanya mitra itu kan hanya sebagai pelengkap saja,”

jelas Elsy Syarief dari HAPI.

Elsya menduga rencana revisi ini hanyalah ambisi atau keinginan dari seorang yang ingin menjadi Ketua Umum dari organisasi advokat secara keseluruhan. Namun jika hal tersebut terpaksa dibuat, ia minta agar ketua umum dan sekjen dari organisasi persatuan advokat tersebut harus non aktif dari kegiatan advokatnya. Dengan kata lain ketua umum dan sekjen organisasi tersebut harus mengurus organisasi persatuan advokat tersebut secara penuh.

Menanggapi hal tersebut Pimpinan Rapat, Dimiyati mengatakan bahwa perbedaan di era demokrasi ini adalah hal yang wajar. Namun yang terpenting dari semua itu adalah semangat untuk memperbaiki sistem keadvokatan di Indonesia.

“Namanya demokrasi, pro dan kontra adalah hal yang wajar. Tapi tentunya kami berharap revisi undang-undang ini menjadi solusi yang bisa menaungi semua pihak,” tegas Dimiyati. (Ayu) foto:ry/parle

PGN Diminta Lakukan Revolusi



Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani saat mengajukan pertanyaan dengan PGN.

Komisi VII DPR RI minta Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan terobosan atau revolusi di bidang gas dan energi. Komisi VII meminta agar rencana PGN untuk menjadi yang terdepan dalam bidang gas dari hulu ke hilir direalisasikan segera.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani saat rapat dengan PT PGN, Senin (25/3) yang dipimpin Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana.

“Saya ingin PGN seperti Pertamina. PGN bisa mensuplai gas untuk masyarakat umum termasuk transportasi. Dengan begitu PGN jangan pasrah hanya sebagai distributor saja, yang hanya menerima pasokan gas dan kemudian mendistribusikannya. Di bawah kepemimpinan Pak Hendi dan bapak-bapak lainnya ini buatlah terobosan atau revolusi di bidang gas dan energi. Kalau tetap seperti ini, berarti PGN hanya sebagai makelar saja,” tegas Dewi.

Selama ini menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Bobby Rizaldi, Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi

salah satu “anak emas” Komisi VII. Hal tersebut merupakan apresiasi terhadap kinerja PGN.

Dalam laporannya kepada Komisi VII DPR RI, Dirut PT PGN, Hendi Priyo Santoso menyampaikan laba bersih yang di terima PGN meningkat 45 persen dari tahun sebelumnya sebesar 5,9 triliun rupiah menjadi 8,6 triliun di tahun 2012, dengan total dividen dari pemerintah sekitar 1,7 triliun rupiah.

“Kami Komisi VII DPR mengapresiasi laporan kinerja PT Perusahaan Gas Negara (PGN) tahun 2012 serta pengelolaan manajemen yang sehat berupa peningkatan laba bersih dan dividen bagi Negara,” ujar pimpinan rapat.

Menjawab hal tersebut Dirut PT PGN, Hendi mengakui bahwa saat ini PT PGN kurang diberdayakan atau dengan kata lain *underload*. Hendi juga menjelaskan bahwa PT PGN kini telah melakukan pengembangan usaha baru untuk rencana jangka panjang. Salah satunya dengan membentuk PT Saka Energi Indonesia.

“Kami setuju dengan arahan Bu Dewi, oleh karena itu kami telah membuat PT Saka Energi yang salah satunya ada di Blok Ketapang, Jawa Timur dengan potensi produksi minyak bumi sampai 25 ribu barel per hari dan gas bumi sebanyak 50 mmscfd,” jelas Hendi.

Ditambahkannya PT PGN juga melakukan investasi di Blok Bangkanai, Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan Salamander. Adapun perkiraan cadangan gas di sini 250 miliar kaki kubik. Meski demikian, dikatakan Hendi, pihaknya akan terus memacu kinerjanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara langsung, maupun negara pada umumnya. (Ayu) foto:ry/parle

Pembahasan RUU Advokat Ricuh

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Advokat di Badan Legislatif DPR RI (Baleg), Senin (25/3) berlangsung ricuh. Pasalnya, advokat Todung Mulya Lubis yang turut hadir dalam rapat tersebut, dianggap bukan lagi sebagai advokat.

Rapat Baleg yang dipimpin Wakil Ketua Baleg, Dimiyati Natakusumah (F-PPP) mengagendakan acara menerima masukan RUU Advokat dari sejumlah organisasi advokat yang diundang, antaralain Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), HKHPM (Himpunan, Konsultan Hukum Pasar Modal), dan sejumlah organisasi advokat lain.

Kehadiran organisasi advokat tersebut, memenuhi ruang rapat Baleg di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, hingga banyak anggota Baleg yang tidak kebagian tempat duduk.

Kehadiran para advokat di ruang baleg tersebut berlangsung tidak tertib. Mereka berbicara semaunya, tidak mengindahkan tata tertib. Padahal seharusnya yang berhak

mengatur adalah pimpinan sidang.

Dimiyati selaku pimpinan sidang, bahkan sudah mengingatkan pada para advokat yang hadir. Berkali-kali Dimiyati menyatakan agar para advokat berhenti bicara. “Mau mendengarkan tidak?” kata Dimiyati seperti berbicara kepada anak TK. (sc) foto: ry/parle



Todung Mulya Lubis dan sejumlah Advokat lainnya saat memberikan masukan terkait pembahasan RUU Advokat.

DPR Desak PP Otsus Aceh Segera Diselesaikan



Wakil Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh DPR Marzuki Daud didampingi Anggota Tim Nasir Djamil berdialog dengan masyarakat Aceh.

DPR mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaan otsus di Aceh.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh DPR Marzuki Daud usai melakukan kunjungan kerja Tim Pemantau pelaksanaan undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Tim pemantau Pelaksanaan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Aceh melakukan kunjungan kerja di Idi Rayeuk, Aceh Timur, Kamis (20/3).

Sejumlah anggota DPR yang ikut dan tergabung Tim pemantau yang di pimpin oleh Marzuki Daud ini juga hadir Nasir Djamil, Nova Iriansyah dan anggota Tim yakni Bobby Adhityo Rizaldi, Sayed Muhammad Muliady, Rahadi Zakaria, dan Sayed Mustafa Usab.

Marzuki mengatakan bahwa PP yang masih belum terselesaikan oleh pemerintah diantaranya menyangkut peraturan mengenai Pertanahan, Kewenangan dan pengelolaan Minyak dan Gas (Migas). "Ketiga PP ini penting untuk menciptakan keleluasaan bagi

Aceh dalam menjalan Otsus," tegasnya.

Diharapkan, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat Aceh kepada pusat sehingga ada harmonisasi antara pusat dan daerah. Marzuki mengungkapkan bahwa, sudah enam tahun RPP Migas tak pernah selesai. "Saya minta agar hal itu jadi perhatian serius pemerintah," kata Marzuki yang juga anggota Komisi VI DPR.

Marzuki mengatakan, Aceh juga harus ikut serta dalam pengelolaan migas lepas pantai sampai 200 mil laut. "Itu bagian yang harus kita pertahankan," katanya.

Selain soal RPP Migas, Marzuki juga mempertanyakan RPP Pertanahan dan RPP Kewenangan. "Khusus RPP Pertanahan masih sangat mentah," kata Marzuki.

Menurut dia, desakan untuk segera dikeluarkannya PP Otsus Aceh ini tidak berlebihan, mengingat saat ini kesejahteraan masyarakat Aceh masih tertinggal. Sebanyak 20 kabupaten di Aceh masih merupakan daerah miskin. "Daerah miskin di Aceh masih ada di

20 kabupaten bukan 12 yang di klaim pemerintah. Artinya pendapatan masyarakat masih rendah," katanya.

Tim pemantau DPR, kata Marzuki mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan ketat dan mengawasi ketat jalannya pemerintahan Aceh.

DPR, lanjutnya juga mengawasi dana Otsus untuk Aceh yang dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat Aceh. "Hasil pengawasan tahun lalu dari pelaksanaan dan penyerapan dana dana otsus memang masih ada kelemahan, tetapi dengan DPR meminta dilakukan perbaikan dan ditingkatkan dengan perubahan penyegaran aparat. Kita harapkan tahun ini kinerjanya bisa meningkat," ujarnya.

Marzuki mengatakan bahwa dengan terserapnya dana otsus dan diselesaikannya PP Otsus Aceh maka diharapkan akan bisa menciptakan kemakmuran di Aceh," katanya.

DPR, lanjutnya juga akan memanggil Kementerian terkait untuk membahas kembali persoalan Aceh dan Papua khusus untuk pelaksanaan Otsus. (as)

Komisi IV Dukung Sektor Hortikultura Lokal



Ketua Komisi IV Romahurmuzy berjabat tangan dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia.

Komisi IV DPR RI mendukung pengaturan penyelenggaraan hortikultura yang bertujuan untuk menjamin pengadaan produk hortikultura kepada masyarakat dengan meningkatkan produk hortikultura lokal maupun devisa negara, serta untuk melindungi petani hortikultura.

“Sub sektor hortikultura merupakan salah satu sub sektor strategis, dan menjadi perhatian DPR RI dengan ditetapkannya UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai salah satu bentuk dukungan DPR RI terhadap sektor hortikultura lokal,” kata Ketua Komisi IV Romahurmuzy, saat memimpin RDPU dengan Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia, Asosiasi Umbi-Umbian Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel, Asosiasi Importir Makanan Olahan, Asosiasi Eksportir dan Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia, di Gedung DPR, Senin (25/3).

Romahurmuzy, menyatakan prihatin terhadap perkembangan impor sub sektor hortikultura. “Sejak tahun 2006 impor produk hortikultura terus mengalami peningkatan, bahkan setelah ditetapkannya UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura,” keluhnya.

Sebagai gambaran, sejak tahun 2006 neraca perdagangan hortikultura Indonesia mengalami defisit sebesar US\$289.352.00 dan terus mengalami defisit hingga US\$1.194.827.000 pada tahun 2011 atau setara 1.670.623 ton.

Perhatian DPR RI terhadap perkembangan sektor hortikultura lokal, menurut Romahurmuzy tidak hanya pada pengaturan usaha tani hortikultura yang baik, namun juga mengenai tata cara impor produk hortikultura.

“Pasal 88 UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dengan jelas mengamanatkan mengenai ketentuan kegiatan impor produk hortikultura, antara lain impor produk hortikultura wajib untuk memperhatikan ketersediaan produk hortikultura dalam negeri, dan dilakukan setelah mendapat ijin dan rekomendasi dari Pemerintah, serta pengaturan mengenai pembatasan pintu masuk impor produk hortikultura,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, penjabaran UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 88 tersebut diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian No.60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Namun demikian, dalam prakteknya importasi produk hortikultura masih terdapat beberapa penyimpangan. “Kasus yang terjadi di Tanjung Priok serta tertahannya raturan kontainer yang berisi komoditas bawang putih merupakan akibat dari terjadinya penyimpangan terutama yang terkait dengan regulasi serta perijinan,” ungkapnya. (as)foto:wy/parle

Pemerintah Harus Ungkap Kasus Penyerbuan Lapas Sleman



Anggota Komisi III Indra.

Anggota Komisi III DPR RI, Indra menyatakan prihatin terhadap kasus penyerbuan Lembaga Pemasaran Masyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta oleh sekelompok orang bersenjata. Ia menyebut aksi itu sebagai hukum rimba yang tidak boleh terjadi di negara hukum yang tegas diatur konstitusi.

“Sebagai negara hukum tidak boleh pihak manapun menggunakan kekuasaannya, kewenangannya seperti hukum rimba. Pemerintah harus bisa mengungkap, jangan sampai

ini di-petieskan atau mengambang begitu saja tanpa kejelasan pihak mana yang harus bertanggung jawab,” tegasnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/13).

Ia menolak menjawab soal dugaan keterlibatan oknum TNI dalam penyerangan tersebut. Baginya yang penting proses investigasi harus dilakukan secara akuntabel, transparan dan profesional. Baginya ini penting untuk memberikan rasa aman dan menjaga kepercayaan

publik terhadap hukum di negeri ini.

Politisi FPKS ini mengusulkan Komisi III perlu mendalami kasus ini dengan melakukan kunjungan lapangan dan rapat gabungan. "Saya berharap Komisi III bisa mengunjungi lapangan untuk melihat sendiri fakta yang akurat dan

kita bisa membuat analisis yang lebih matang. Sangat mungkin dilaksanakan rapat kerja gabungan termasuk juga dengan Komisi I," demikian Indra.

Penyerangan oleh kelompok bersenjata ke Lapas Sleman, Yogya dilakukan Sabtu dini hari (23/3). Mereka membuka

paksa dan mengancam penjaga lapas dengan todongan senjata api. Aksi cepat yang berlangsung 15 menit itu berakhir setelah mereka menembak mati tahanan, 4 tersangka pembunuhan Sersan Satu Santosa, anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI. (iky)foto:wy/parle

KPU Beri Penjelasan Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2014



Suasana rapat Komisi II DPR dengan jajaran KPU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dalam kesempatan RDP dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Senin (25/3), memberikan beberapa pokok-pokok penjelasan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Dalam penjelasannya, Husni menerangkan beberapa kebijakan dan keputusan KPU dalam menyikapi sengketa pasca tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014, "Mengingat beberapa Parpol calon peserta pemilu tahun 2014 mengajukan gugatan melalui PTUN pasca putusan Bawaslu dan beberapa gugatan telah diputuskan dan dikabulkan," kata Husni.

KPU menurut Husni, telah menetapkan keputusan KPU No : 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara No: 12/G/2013/PT.TUN JKT tanggal 7 Maret 2013, dan Keputusan KPU No: 143/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Perubahan Keputusan KPU : 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

"Dengan demikian sampai saat ini telah ditetapkan 11

(sebelas) partai politik nasional peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Partai Bulan Bintang pada nomor urut 14, setelah 3 (tiga) partai politik lokal Aceh," terang Husni pada Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar ini.

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan dan penataan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, KPU telah menetapkan keputusan KPU No: 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang jumlah Penduduk Provinsi dan Kab/Kota serta jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilu 2014, sebagian dasar penetapan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

"KPU juga telah pula menetapkan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2014 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012.

KPU, jelas Husni, telah mensosialisasikan Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota kepada DPP Parpol dan melalui website KPU.(nt), foto:wy/parle

Sosialisasi RUU Ratifikasi Konvensi Rotterdam Sangat Diperlukan

Sosialisasi terhadap Ratifikasi Konvensi Rotterdam kepada masyarakat luas perlu segera dilakukan, mengingat dampak dari penggunaan bahan-bahan kimia khususnya bahan berbahaya dan beracun (B3) sangat membahayakan. Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR Arsyad Julandi Rachman, ketika melakukan pertemuan dengan jajaran Direktur PT Indah Kiat Pulp and Paper dan Kementerian Lingkungan Hidup di Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (20/3) lalu.

Politisi Partai Golkar ini juga mempertanyakan sejauh mana persiapan industri khususnya implementasi substansi *raw material* kimia yang terkait dengan Ratifikasi Konvensi Rotterdam. “Seberapa besar signifikansi ratifikasi Konvensi Rotterdam terhadap aktivitas penyimpanan, pelatihan tenaga kerja, pencatatan, dan prosedur bongkar muat,” ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut Direktur Utama PT Indah Kiat Pulp and Paper Yan Partawijaya menjelaskan, implementasi substitusi *raw material* kimia yang terkait dengan ratifikasi Konvensi Rotterdam dari sektor industri dirasa masih kurang. Terutama terkait jenis-jenis bahan kimia yang diperbolehkan pemakaiannya, pema-

kaiannya terbatas atau yang dilarang penggunaannya termasuk alternatif substitusi *raw material* kimia yang dapat dipakai sebagai pengganti jenis-jenis yang dilarang atau terbatas pemakaiannya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk itu, Yan Partawijaya menyarankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perindustrian dan instansi pemerintah lainnya agar lebih aktif mensosialisasikan Konvensi Rotterdam dan implementasinya. Selain itu pemerintah diharapkan mengeluarkan daftar alternatif substitusi bahan kimia yang diijinkan penggunaannya.

Ia mengemukakan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang mengatur tentang tata cara penyimpanan bahan, registrasi dan pencatatan, sedangkan pelatihan tenaga kerja terkait pengelolaan bahan kimia di industri diatur dalam SMK3



Ketua Komisi VII Sutan Bhatogana dan Direktur Utama PT Indah Kiat Pulp and Paper Yan Partawijaya.

(Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja).

PT Indah Kiat Pulp and Paper sambung Yan, mengolah bahan baku serpihan kayu menjadi produk *pulp* dan kertas serta penggunaan bahan kimia ada 2 sektor, yaitu HTI dan proses produksi. Sedangkan pada proses produksi, bahan kimia yang dipergunakan adalah *white liquor* yang terdiri antara lain soda (NaOH), natrium sulfida (Na₂S), klorin dioksida (ClO₂) dan hidrogen peroksida (H₂O₂). Terkait pengadaan bahan-bahan kimia tersebut didapat sebagian besar dari produksi lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari impor. (spy) foto:sp/parle/ry

Perdagangan Bahan Kimia Dan Pestisida Sulit Dikendalikan



Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali mengatakan, perdagangan bahan-bahan kimia dan pestisida termasuk bahan berbahaya dan beracun yang jumlahnya sangat banyak masih sulit dikendalikan di Indonesia.

“Kita mengharapkan Konvensi Rotterdam akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada Indonesia sebagai pengguna dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan internasional bahan-bahan tertentu,” ujarnya saat mengadakan kunjungan kerja spesifik RUU Rotterdam ke PT Samator Surabaya, baru-baru ini.

Menurut Zainudin, Indonesia masih memiliki keterbatasan pengalaman dan infrastruktur untuk menjamin keamanan atas penggunaan bahan kimia dan pestisida. Karena itu, diharapkan RUU tentang pengesahan Konvensi Rotterdam, dapat mengatur kebijakan perdagangan bahan kimia dan pestisida serta keterkaitannya dengan perlindungan

lingkungan hidup.

“Ini didasari atas kekhawatiran dampak dari penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida khususnya B3 bagi kesehatan manusia dan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Berkaitan dengan itu, lanjutnya, Komisi VII DPR perlu mengunjungi langsung lokasi perusahaan PT Samator Surabaya untuk melihat langsung dan mendapatkan infor-

masi terkait pemanfaatan, pengelolaan dan perdagangan bahan-bahan kimia.

Dia mengharapkan kunjungan spesifik ini dapat memberikan informasi yang cukup agar dapat menjadi dasar dan pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI untuk mengambil kebijakan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, khususnya untuk pembahasan dan pengesahan RUU Tentang Konvensi Rotterdam. (si)



Ketua Komisi XI Emir Moeis didampingi Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang dan Gubernur BI terpilih Agus Martowardojo.

Komisi XI Setujui Agus Jadi Gubernur BI

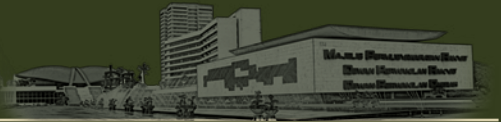
Komisi XI DPR RI menetapkan Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018 melalui voting. Agus akan menggantikan Darmin Nasution yang masa jabatannya berakhir pada 22 Mei nanti. Rapat internal tertutup Komisi XI berlangsung dari pukul 14.30 hingga 20.30 WIB, Selasa kemarin (26/3).

Ketua Komisi XI Emir Moeis menjelaskan, dari 54 anggota Komisi XI, 46 orang mendukung Agus, 7 tidak mendukung, dan 1 orang abstain. Belum bisa dipastikan siapa yang menolak dan siapa yang abstain.

“Ini merupakan rapat terberat dalam rapat tiga tahun terakhir. Tapi, malam ini kita berhasil menentukan Agus menjadi Gubernur BI,” kata Emir di Gedung Nusantara I, Selasa malam (26/3).

Anggota Komisi XI Ecky Awal Muharram menyatakan menerima hasil keputusan yang diambil lewat voting. Alasannya, hasil voting adalah keputusan demokrasi yang harus dihargai.

“Saya berharap ini yang terbaik buat Indonesia. Saya menilai Agus orangnya kredibel. Saya juga berharap Agus dapat melakukan penyesuaian lebih cepat di kantor barunya. Ekonomi makro dan fiskal Indonesia sedang tertekan. Perlu segera penanganan tepat melalui kebijakan yang tepat pula. Diharapkan juga antara BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menteri Keuangan, solid dan bisa berkoordinasi efektif,” ujar Ecky. (sf), foto : wy/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam sidak bawang putih di Terminal Peti Kemas Tanjung Perak Surabaya. (20/3) foto HR



Komisi VII DPR meninjau kondisi PLTU Pacitan yang dipimpin oleh Totok Daryanto. (25/3) foto SI



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi berdialog dengan Dirjen Bina Marga dan Dirut Jasa Marga membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2012 dan pelaksanaan anggaran 2013 serta evaluasi penyelenggaraan jalan tol. (27/3) foto WY



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini dan Kepala BNPB Syamsul Maarif usai Raker yang menyetujui besaran Dana Penanggulangan Bencana tahun 2013. (26/3) foto RY



RDPU Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dipimpin Sumarjati Arjoso menghadirkan pengamat ekonomi Hendri Saporini, LKKNI, ICW, IBC, dan FITRA membahas efektifitas penyaluran bantuan sosial, di ruang rapat BAKN, (28/3) foto:RY



Suasana survei internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online dipimpin oleh Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI K. Johnson Rajagukguk. (27/3) foto WY